URGENSI PENGATURAN JAMINAN KREDIT DALAM SEKTOR *PEER TO PEER (P2P) LENDING* DI INDONESIA

Amalia Vanny Shania

E-mail: amaliavannyshania14@gmail.com
Staff Bank Rakyat Indonesia, Jakarta Selatan

Dona Budi Kharisma

Email: donabudikharisma@gmail.com
(Penulis Korespondensi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Credit Guarantee; Non Performing Loan; Peer to Peer (P2P) Lending.*

Kata Kunci: Jaminan Kredit; Kredit Bermasalah; *Peer to Peer (P2P) Lending.*

Abstract

This articles aims to analyse and examine the importance of implementing credit guarantee on peer to peer (p2p) lending mechanism in Indonesia as a form of prevention of Non Performing Loan Risk and the ideal type of credit guarantee to be applied on peer to per (p2p) lending mechanism. This research is a normative legal research with a perspective character with a consepual approach. The type of data used is secondary data which includes primary dan secondary legal materials. Meanwhile, the thechnique of collecting data in examining these problems use a literature study technique which is then carried out by technical analysis using the deductive method. The results show that there is urgency for the application of credit guarantee on peer to peer (p2p) lending sector based on 3 important aspects, namely philosophical, juridical, and sociological foundations. The urgency is related to the risk of non performing loan or default by the borrower which must be borne by the the lender. Implementing fiduciary security into peer to peer (p2p) lending mechanism can be an ideal solution to provide protection and legal certainty for lenders while minimizing the potential risk of non performing loan.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai pentingnya penerapan jaminan kredit dalam mekanisme *peer to peer (p2p) lending* di Indonesia sebagai wujud penanggulangan risiko kredit macet dan jenis jaminan kredit yang ideal untuk diterapkan dalam mekanisme *peer to peer (p2p) lending*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat perskriptif dengan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam mengkaji permasalahan tersebut dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yang selanjutnya dilakukan teknis analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa terdapat urgensi atas penerapan jaminan kredit pada sektor *peer to peer (p2p) lending* berdasarkan 3 aspek penting yakni landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Urgensi tersebut berkaitan dengan adanya risiko kredit macet atau gagal bayar oleh penerima pinjaman yang harus ditanggung pemberi pinjaman. Dengan menerapkan jaminan fidusia ke dalam mekanisme *peer to peer (p2p) lending* dapat menjadi solusi yang ideal untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pemberi pinjaman sekaligus meminimalisir potensi risiko kredit macet tersebut.

A. Pendahuluan

Kegiatan pinjam meminjam uang telah menjadi bagian dari kegiatan perekonomian masyarakat sejak dahulu hingga saat ini setelah masyarakat mengenal dan menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Sebagian besar masyarakat telah melakukan kegiatan pinjam meminjam uang untuk berbagai hal kebutuhan perekonomiannya seperti untuk kepentingan bisnis agar dapat terus berjalan dan berkembang, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk meningkatkan taraf kehidupannya (M. Bahsan, 2007:1). Pada awalnya, bank menjadi salah satu tempat yang biasa digunakan masyarakat untuk mendapatkan dana pinjaman melalui prosedur-prosedur yang cukup panjang dan pasti dilakukan secara tatap muka. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perekonomian dunia memasuki babak baru dengan dikenalnya istilah *digital economic* yang mana di dalamnya meliputi industri *financial technology (fintech)*. *Fintech* memiliki konsep yaitu adaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (p2p) lending*, serta *crowd funding* (Immanuel Adhitya, 2017:138).

Peer to peer (p2p) lending adalah proses pinjam meminjam yang mempertemukan penerima pinjaman dan pemberi pinjaman pada *platform* internet atau situs web tanpa perantara lembaga keuangan seperti bank. Situs web *peer to peer* bertindak sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman (Bachmann dkk., 2011 : 5). Sebagai aplikasi revolusioner, *peer to peer (p2p) lending* dapat memfasilitasi pengeposan dan pencarian informasi dan menyediakan semua fungsi yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi secara efektif (Chen, 2012:2). Beberapa keunggulan dari *peer to peer (p2p) lending* yaitu tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan dan tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak (Penjelasan POJK

77/2016). Milne dan Parboteeah (2016) menyebutkan keuntungan lainnya dari *peer to peer (p2p) lending*. Pertama, menawarkan keuntungan yang lebih tinggi untuk pemberi pinjaman daripada bank konvensional dan biaya rendah untuk peminjam. Kedua, memberikan akses kredit bagi beberapa kategori peminjam yang tidak bisa mendapatkan akses pinjaman dari bank. Ketiga, *peer to peer (p2p) lending* memiliki nilai sosial dibandingkan bank konvensional. Keempat, teknologi inovasi meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan (Milne, 2016:4).

Namun, dibalik segala kemudahan tersebut terdapat beberapa permasalahan risiko yang harus ditanggung oleh pihak yang terkait, diantaranya risiko tarif bunga yang tinggi, risiko kredit macet, hingga cara-cara penagihan yang tidak patut (Windy Sonya Novita, 2020:156). Pokorna dan Sponer mengemukakan bahwa risiko terbesar dimiliki oleh pemberi pinjaman yakni mengenai kredit buruk oleh penerima pinjaman (Pokorna, 2016:331). Banyak penerima pinjaman yang mengajukan pinjaman memiliki peringkat kredit rendah yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman melalui bank konvensional. Selain itu, tidak adanya asuransi/perlindungan dari pemerintah kepada pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman (Corporate Finance Intitute, 2015). Berdasarkan data OJK mengenai perkembangan *peer to peer (p2p) lending* per Agustus 2020, tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90) mengalami penurunan menjadi 91,12% yang berarti wanprestasi pinjaman di atas 90 hari (TWP90) dari 157 penyelenggara *peer to peer (p2p) lending* mencapai 8,88%. Angka tersebut melonjak banyak apabila dibandingkan rasio TWP90 per Januari 2020 yaitu sebesar 3,98% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pun belum mengatur adanya jaminan kredit dalam perjanjian pinjam meminjam. Layanan keuangan tanpa jaminan khusus untuk disepakati seperti jaminan perorangan atau kebendaan memiliki risiko lebih tinggi (Lu, 2018:320). Risiko tersebut lebih mengacu bagi pemberi pinjaman. Trisandini, Anindya dan Ninis menjelaskan terkait posisi pemberi pinjaman dalam *peer to peer (p2p) lending*. Tanpa agunan khusus sebagai jaminan, posisi pemberi pinjaman akan sangat berisiko karena mereka hanya bertindak sebagai kreditor konkuren atas jaminan umum, terutama apabila penerima pinjaman gagal menyelesaikannya pelunasan utangnya (wanprestasi) (Usanti, 2019:166-167). Hal ini tentu tidak adil bagi pemberi pinjaman, mengingat mereka tidak mengetahui secara pasti aset penerima pinjaman dan berapa banyak kreditor yang melakukan perikatan dengannya. Oleh karena itu, dalam hal penerima pinjaman dianggap wanprestasi dalam pembayaran kreditnya, pemberi pinjaman dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dengan menggugat debitor wanprestasi tersebut ke pengadilan negeri. Kendati demikian, akan bermasalah bila kreditnya tidak seberapa, seperti yang terjadi pada Danamas. Jumlah minimum kredit yang diberikan Danamas adalah Rp500.000, dan akan banyak membuang waktu, biaya, dan tenaga jika mereka mengajukan gugatan ke pengadilan umum atas pinjaman sekecil itu.

Berdasarkan permasalahan di atas nampak jelas bahwa belum adanya regulasi terkait penerapan jaminan kredit dalam layanan *peer to peer (p2p) lending* di Indonesia sebagai wujud perlindungan bagi pemberi pinjaman atas risiko kredit. Oleh karena itu artikel ini mengkaji urgensi pengaturan jaminan kredit dalam sektor *peer to peer (p2p) lending* di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analitical & conseptual Approach*) dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*literature research*). Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis silogisme deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan atau konklusi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan mengenai jaminan kredit dalam sektor *peer to peer (p2p) lending* di Indonesia dapat disusun berdasarkan:

1. Landasan Filosofis

Dasar filosofis jaminan kredit dalam *peer to peer (p2p) lending* terdapat pada sila kedua Pancasila. Pinjam meminjam uang merupakan implementasi upaya mewujudkan rasa kemanusiaan dengan saling membantu dalam bidang perekonomian. Dalam kegiatan usaha *peer to peer (p2p) lending* yang beradab tentu akan memperhatikan kepentingan pengguna dengan memitigasi risiko- risiko sedini mungkin, seperti melalui jaminan perlindungan data pribadi, peningkatan kualitas teknologi, dan menjamin perlindungan konsumen tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama.

Sila kelima Pancasila pun turut memberikan landasan filosofis. Sebagai perwujudan sila tersebut, penyelenggara diharapkan dapat berlaku adil dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam melaksanakan pinjam meminjam uang. Selayaknya dalam kehidupan nyata, dalam *peer to peer (p2p) lending* tetap perlu menjamin kepentingan pemberi pinjaman atas pelunasan utang penerima pinjaman melalui penegasan kewajiban penyerahan jaminan kredit oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Dengan menetapkan regulasi terkait jaminan kredit dalam *peer to peer (p2p) lending*, pemerintah dapat memenuhi kewajibannya kepada rakyat, dalam hal ini memastikan perlindungan kepentingan pemberi pinjaman atas risiko kredit macet oleh penerima pinjaman yang pada akhirnya akan berdampak pula pada stabilitas perekonomian negara.

Kemudian, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Melalui pengaturan jaminan kredit yang dituangkan dalam bentuk undang-undang mengenai *fintech peer to peer (p2p) lending* mampu menjadi upaya nyata pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Inisiatif pembentukan undang-undang tersebut dipertegas pula dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum

merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warga negaranya (Kusnardi dan Ibrahim, 1983:153) tanpa terkecuali. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia sehingga penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur perlindungan hukum (Ishaq, 2009 : 43) yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, jaminan hukum. Maka dari itu, sudah seharusnya Indonesia memberikan jaminan keadilan kepada warga negaranya melalui pembentukan peraturan hukum yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Melalui pengaturan jaminan kredit dalam *peer to peer (p2p) lending*, pemberi pinjaman akan mendapatkan perlindungan sekaligus kepastian hukum atas pelunasan utang penerima pinjaman, mengingat dalam *peer to peer (p2p) lending* segala risiko kredit menjadi tanggung jawab pemberi pinjaman.

2. Landasan Yuridis

Pengaturan mengenai jaminan kredit bagi bank telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagai wujud tanggung jawab atas dana masyarakat yang telah dihimpun serta untuk menanggulangi risiko kredit macet maka bank wajib melakukan analisis mendalam atas kemampuan dan kesanggupan calon debitur dalam melunasi utangnya. Analisis yang harus dilakukan bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan tersebut melalui penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, kondisi perekonomian, dan prospek usaha calon debitur. Mengenai agunan atau jaminan kredit tertuang pula dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa dalam pemberian kredit atau pembiayaan tersebut diikuti dengan pemberian jaminan kredit oleh debitur, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 didalam pemberian kredit akan diikuti pemberian jaminan kredit oleh debitur.

Meskipun pada dasarnya lembaga perbankan tidak dapat dipersamakan dengan *peer to peer (p2p) lending* yang merupakan lembaga pembiayaan (lembaga non-perbankan), namun pada intinya terdapat kesamaan terkait pelaksanaan pinjam meminjam uang yang tentu memiliki risiko utama dalam perkreditan yang cenderung sama pula. Risiko seperti kegagalan bayar, kredit macet perlu dimitigasi secara serius melalui pengaturan dalam undang-undang *fintech* terkait *peer to peer (p2p) lending* dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang telah menyiratkan hal tersebut.

Jaminan kredit dalam *peer to peer (p2p) lending* telah diisyaratkan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jaminan secara umum dilandasi oleh Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, telah diatur pula jaminan khusus yang terdiri dari jaminan kebendaan seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia, resi gudang serta jaminan penanggungan perorangan, perusahaan, dan bank.

3. Landasan Sosiologis

Pembentukan regulasi *peer to peer (p2p) lending* terkait jaminan kredit melalui dasar sosiologis adalah sebagai berikut:

Pertama, penyaluran pinjaman sejak awal didirikannya *peer to peer (p2p) lending* terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga bulan Agustus tercatat sudah sebanyak Rp104,53 triliun (naik 112,74%) dana tersalurkan. Eksistensi *peer to peer (p2p) lending* pun terbukti dengan meningkatnya jumlah rekening penerima pinjaman hingga 113,37% yoy dan penerima pinjaman sebesar 26,24% yoy. Sektor ini memiliki pertumbuhan yang signifikan dengan beberapa diantaranya dikarenakan sektor *peer to peer (p2p) lending* ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana dengan cepat meskipun nominalnya tidak sebesar pada pinjaman bank konvensional serta menargetnya populasi *unbanked* sebagai wujud upaya mendorong kemajuan inklusi keuangan nasional. Berdasarkan riset Google, Tamasek dan Bain & Company 2019 yang bertajuk “e-Conomy South East Asia 2019” yang dilansir oleh Databoks, menyatakan bahwa sebanyak 42 juta orang Indonesia sudah memiliki akses perbankan dan 92 juta orang Indonesia atau setengah populasi orang dewasa, masuk dalam kategori *unbanked* atau mereka yang tidak memiliki akses perbankan (Viva Budy Kusnandar, 2019). Berdasarkan hal tersebut maka tidak heran apabila dalam beberapa kurun waktu saja sektor ini mampu memiliki pertumbuhan kredit yang sangat baik.

Namun, dengan segmentasi pasar yang cukup banyak menargetkan populasi *unbanked*, dapat menjadi “*boomerang*” tersendiri apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah bahkan *platform* itu sendiri. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan pada tahun 2016 dan 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020), menunjukkan hasil bahwa melalui 12.773 responden di 34 provinsi di Indonesia yang mencakup 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan gender dan strata wilayah perkotaan/perdesaan, tingkat literasi keuangan di Indonesia terjadi peningkatan sebesar 8,33% pada tahun 2019 yaitu 38,03% yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 29,7%. Apabila dibedah berdasarkan strata wilayah, indeks literasi keuangan pada perkotaan mencapai 41,41% sedangkan pada perdesaan sebesar 34,53% dan 68,49%. Dalam survei pada tahun 2016 mendapatkan hasil pula bahwa dari segi pengetahuan tentang fitur mencapai 84,16%, pengetahuan tentang manfaat mencapai 86,57%, dan pengetahuan tentang denda mencapai 66,04%. Namun, pengetahuan dari segi risiko, cara memperoleh, hak, kewajiban dan biaya tergolong rendah, yakni dibawah 50% (Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2018) sedangkan hal tersebut merupakan hal yang cukup krusial apabila dikaitkan dengan potensi risiko kredit macet akibat penerima pinjaman itu sendiri.

Kedua, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak mengatur mengenai jaminan kredit bagi pemberi pinjaman dalam *peer to peer (p2p) lending*. Tanpa adanya aturan mengenai jaminan kredit akan memberikan kesempatan bagi oknum yang tidak bertanggung

jawab mendapatkan celah-celah untuk melakukan wanprestasi. Selain itu, mengakibatkan pemberi pinjaman kurang mendapatkan perhatian atas pemenuhan haknya untuk mendapatkan jaminan pelunasan utangnya. Pemberi pinjaman memiliki risiko kehilangan seluruh atau sebagian dananya atas perbuatan wanprestasi penerima pinjaman dan tidak akan menjadi tanggung jawab penyelenggara apabila hal tersebut terjadi.

Ketiga, LBH Jakarta mengatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam *peer to peer (p2p) lending* seperti penetapan bunga yang besar dan terdapat peminjam rangkap di banyak penyelenggara jasa *peer to peer (p2p) lending* (Sitompul, 2018: 74). Selain karena belum diatur secara tegas melalui peraturan perundang-undangan, penetapan bunga pinjaman oleh *platform peer to peer (p2p) lending* yang cenderung lebih tinggi dari pada bank konvensional kemungkinan besar dipengaruhi oleh tidak adanya kewajiban bagi penerima pinjaman untuk menyerahkan jaminan kredit sebagai persyaratan penting diterimanya pengajuan kreditnya. Permasalahan tersebut tentu menjadi pemicu terjadinya wanprestasi oleh penerima pinjaman yang sangat memengaruhi tingkat risiko kredit macet. Hal tersebut terbukti cukup mengkhawatirkan apabila tidak diperhatikan lebih serius dan tegas. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan mengenai Statistik *Peer to Peer (P2P) Lending*, diketahui bahwa tingkat kredit bermasalah terus meningkat sejak Januari 2020 yang tadinya hanya sebesar 3,98% kemudian menanjak sebesar 4,93% per April 2020 hingga mencapai angka 8,88% per Agustus 2020 dan diprediksi masih akan terus menanjak. Hal tersebut diperparah pula dengan gelagat yang mengkhawatirkan dari indikator tingkat keberhasilan 90 hari (TKB90) yang turut mengalami penurunan.

Keempat, sempat adanya fenomena penagihan oleh beberapa *platform peer to peer (p2p) lending* yang tidak layak. Liputan6 Surabaya melalui websitenya mengatakan bahwa hal tersebut bermula diketahui dari adanya aduan oleh puluhan warga yang terjerat pinjaman *online* yang tidak dapat mengembalikan sejumlah dana yang dipersyaratkan oleh *platform* terkait karena tingginya bunga dan ketidaksesuaian jumlah pencairan dana kepada pihak yang berwenang (Liputan6.com, 2019). *Platform* tersebut kemudian menempuh cara penagihan dengan mengerahkan *debt collector* atau penagih utang dengan jalan meneror yang sangat mengintimidasi penerima pinjaman bahkan kerabatnya yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjanjian kredit tersebut melalui pesan pendek di telepon seluler maupun media sosial. Penerima pinjaman yang terlilit utang tersebut pun menghadapi teroran dan beban malu tersebut dengan cara gali lubang tutup lubang pada beberapa *platform peer to peer (p2p) lending* lainnya sedangkan kualitas kredit dari penerima pinjaman tersebut tergolong rendah.

Kelima, meskipun penagihan dengan cara meneror bahkan mengintimidasi dilarang, Otoritas Jasa Keuangan belum menyediakan mekanisme mitigasi hingga penyelesaian sengketa apabila terjadi kredit macet oleh penerima pinjaman pada sektor *peer to peer (p2p) lending*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan hanya menjangkau sektor perasuransian, pasar modal, dana pensiun, perbankan, penjaminan, pembiayaan, dan pegadaian. Sebagai

kegiatan pembiayaan yang memanfaatkan teknologi informasi, penyelesaian sengketa pada sektor *peer to peer (p2p) lending* tidak selangkahnya diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa konvensional, melainkan seharusnya diselesaikan melalui model *online dispute resolution (ODR)* atau penyelesaian sengketa daring. Landasan yuridis pelaksanaan ODR tersebut pun telah tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan landasan sosiologis yang kuat dapat sebagai acuan pembentukan kerangka hukum. Pembentukan regulasi *peer to peer (p2p) lending* terkait jaminan kredit akan berfungsi sebagai upaya perwujudan perlindungan hukum terhadap berbagai pihak yang terkait, sebagai mitigasi risiko kredit macet, sebagai penyelesaian masalah terkait mekanisme penagihan utang yang belum memadai, dan tentunya sebagai sarana perwujudan stabilitas perekonomian negara dalam ekosistem ekonomi digital.

D. Simpulan

Urgensi pengaturan jaminan kredit dalam sektor *peer to peer (p2p) lending* di Indonesia dilihat berdasarkan aspek yaitu landasan filosofis yang bertumpu pada Sila Kedua dan Kelima Pancasila serta Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; landasan yuridis yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; dan landasan sosiologis yang dapat dilihat berdasarkan data perkembangan *fintech lending* OJK per 31 Agustus 2020 pertumbuhan *peer to peer (p2p) lending* mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari sisi pengguna maupun *platform* itu sendiri, namun pertumbuhan sektor ini belum didukung dengan regulasi yang memadai dari pemerintah bahkan dari OJK sehingga belum memadainya pula mitigasi risiko atas kegagalan bayar dari penerima pinjaman yang ditanggung oleh pemberi pinjaman.

E. Saran

OJK sebagai regulator sekaligus pengawas dalam sektor *peer to peer (p2p) lending* diharapkan merevisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sehingga mampu mengakomodasi pengaturan hukum jaminan sebagai wujud perlindungan sekaligus kepastian hukum bagi berbagai pihak yang terkait dan sebagai upaya meminimalisir risiko gagal bayar oleh penerima pinjaman.

F. Daftar Pustaka

Buku

Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: CV Sinar Bakti. Cetakan Kelima.

Jurnal

Alexander Bachmann dkk. 2011. "Online Peer-to-Peer Lending". *Journal of Internet Banking and Commerce*. August 2011, Volume 16. Nomor 2, Lunenburg, Jerman: Bagian Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Leuphana.

Alistair Milne dan Paul Parboteeah. 2016. "The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending". *European Credit Research Intitute*. Nomor 17, Brussels, Eropa: Bagian Perbankan *European Credit Research Institute* (ECRI).

Dongyu Chen dan Chaodong Han. 2012. "A Comparative Study of Online P2P Lending in the USA and China". *Journal of Internet Banking and Commerce*. Volume 17 Nomor 2, Cina: Bagian Manajemen Universitas Fuzhou Cina.

Immanuel Adhitya Wulanta Chrismantianto. 2017. "Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 20 Nomor 1, Salatiga: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.

Lerong Lu. 2018. "Promoting SME Finance in the Context of the Fintech Revolution: A Case Study of the UK's Practice and Regulation". *Banking and Finance Law Review*. Volume 33 Nomor 3, Inggris: Bagian Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Bristol.

Martina Pokorna dan Miroslav Sponer. 2016. "Social Lending and Its Risk". *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. Volume 220, Belanda : Bagian Informasi dan Analitika Elsevier.

Sitompul, Meline Gerarita. 2018. "Urgensi Legalitas Financial Technology (*Fintech*): Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia". *Jurnal Yuridis UNAJA*. Volume 1 Nomor 2, Jambi : Bagian Hukum Keperdataan Universitas Adiwangsa Jambi.

Trisandini Prasastinah Usanti, Anindya Prastiwi Setiawati, Ninis Nugraheni. 2019. "The Legal Principle of Collateral in *Fintech* Lending". *Hang Tuah Law Journal*. Volume 3 Issue 2, Surabaya: Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah.

Windy Sonya Novita dan Moch Najib Imanullah. 2020. "Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)". *Jurnal Private Law*. Volume 8 Nomor 1, Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Internet

Corporate Finance Intitute. *What is Peer-to-Peer (P2P) Lending?*. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/peer-to-peer-lending/>. Diakses pada 9 Desember 2020 Pukul 11:58 WIB.

- Kusnandar, Viva Budy. 2019. "Penduduk Dewasa Indonesia yang Belum Tersentuh Layanan Finansial Terbanyak di ASEAN". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/09/penduduk-dewasa-indonesia-yang-belum-tersentuh-layanan-finansial-terbanyak-di-asean>. Diakses pada 26 Desember 2020, pukul 09:02 WIB.
- Liputan6.com, 2019. "Jerat Pinjaman Online, Utang Rp1,5 Juta jadi Rp30 Juta". <https://www.liputan6.com/news/read/4046645/jerat-pinjaman-online-utang-rp-15-juta-jadi-rp-30-juta>. Diakses pada 16 Februari 2021 Pukul 13.27 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan 2020. "Perkembangan Peer to peer (p2p) lending Periode Agustus 2020". <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/-Statistik-Fintech-Lending-Periode-Agustus-2020.aspx>. Diakses pada 6 Oktober 2020 Pukul 20.13 WIB.
- Strategi Keuangan Nasional Inklusif. 2018. POKJA 1 : Edukasi Keuangan. <https://snki.go.id/pilar-1-edukasi-keuangan/>. Diakses pada 26 Desember 2020 Pukul 10:52 WIB.